

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Solihin, Etty Puji Lestari, *Ekonomi Koperasi*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2009.
- Adjie Habib, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Cet. IV, Bandung, 2014.
- Adjie Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, Cet. III, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Adjie Habib, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Cet. II, Bandung, 2009.
- Ali Chidir, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1999.
- Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Danang dan Nusa Apriyanto, *Asas dan Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Genta, Yogyakarta, 2017.
- Firdausy Carunia Mulya, *Koperasi Dalam Sistem Perekonomian di Indonesia*, Pustaka Obor, Jakarta, 2019.
- Firdausy Carunia Mulya, *Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia*, Cet. I, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2019.
- Fuady Munir, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadhikusuma Sutanntya Rahardja, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Hartono Sunarjati, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988.
- Hatta Mohammad, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, LP3ES, Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. XIII, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2017.
- Marzuki Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Predana Media Grup, Cet. IV, Jakarta, 2012.
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

- Munker Hans H., *“Co-Operative Principle & Co-Operative Law” Membangun UU Koperasi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Koperasi*, Alih Bahasa oleh a. Henriques, Jakarta: Rekadesa, 2011.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Bandung: Dian Rakyat, 1985.
- S. Indrati Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- S. Meliala Djaja, *Hukum di Amerika Serikat, suatu studi perbandingan*, Tarsito, Bandung, 1977.
- Salim H, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Rajagrafindo Persada, Cet. II, Jakarta, 2016.
- Sasongko Wahyu, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011.
- Satrio J, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Soekanto Soerjono, *Perbandingan Hukum*, Melati, Bandung, 1989.
- Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Solihin Achmad, Lestari Ety Puji, *Ekonomi Koperasi*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2009.
- Subagyo Ahmad, *Hukum Koperasi Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019.
- Subagyo Ahmad, *Pengawasan Koperasi di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Cet. I, Jakarta, 2017.
- Subekti R, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta,
- Swasono Sri Edi, *Koperasi dan Demokrasi Ekonomi*, UI Press, Jakarta, 2010.
- Untung Budi, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi, Yogyakarta, Cet. I, 2005.
- W. Andjar Pachta, Bachtiar Myra Rosana, dan Salam Abdul. *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Praktik*. Jakarta: Kencana (Prenadamedia Group), 2016.
- Yani Ahmad dan Widjaja Gunawan, *Seri Hukum Bisnis: Koperasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian, dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3191 K/Pdt/2012.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Pdt/2016.

<https://www.kompasiana.com/omitamaharani/683da55834777c46605f852/perannotaris-dalam-pembentukan-koperasi-merah-putih-pilar-hukum-dan-legalitas>.

<https://krandegan.id/artikel/2026/1/27/hati-hati-ini-sanksi-jika-pembangunan-kdmp-dilakukan-di-atas-lahan-lp2b>

http://web.unair.ac.id/admin/file/f_19997_sei12.pdf.